



Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Serta Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2020-2023)

Adelia Yona Rahmatika, Dwi Cahyo Utomo

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit findings, follow-up of audit results, and financial performance on the level of corruption in local governments (an empirical study on regency and city governments in Central Java for the period 2020–2023). The independent variables in this research are audit findings, follow-up of audit results, and financial performance, while the dependent variable is the level of corruption.

The study utilizes secondary data sourced from the audit reports of the Audit Board of the Republic of Indonesia for Central Java and corruption data from the Central Java High Prosecutor's Office. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 140 observations from various regencies and cities in Central Java. The data were analyzed using multiple linear regression analysis.

The results show that audit findings have a negative effect on the level of corruption. Follow-up of audit results shows a positive influence. Financial performance, measured by the independence ratio, has a negative effect on corruption. Financial performance based on the operational expenditure ratio has no significant effect. Meanwhile, financial performance based on the capital expenditure ratio has a negative impact.

Keywords: Audit Findings, Follow-Up of Audit Results, Financial Performance, Independence Ratio, Operational Expenditure Ratio, Capital Expenditure Ratio, Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena global yang telah lama menjadi perhatian berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun bukan persoalan baru, tingkat prevalensi korupsi menunjukkan dinamika yang fluktuatif seiring waktu. Dalam perspektif hukum, moral, dan ekonomi, korupsi dipandang sebagai tindakan tercela karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Ertimi & Saeh, 2013 ; Vian 2020) Sektor keuangan publik menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap praktik korupsi karena menyangkut pengelolaan sumber daya besar melalui mekanisme perpajakan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset negara (Liu & Lin, 2012).



Korupsi sering kali terjadi dalam lingkungan yang minim pengawasan, lemah dalam sistem penegakan hukum, serta rendah dalam dokumentasi dan keterbukaan informasi (Vian, 2020; Yahya et al., 2023). Akibatnya, praktik korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan tingkat pengangguran (Verawaty, 2019). Kondisi ini menjadi lebih kompleks dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya pada era desentralisasi, di mana otonomi yang diberikan sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas tata kelola yang memadai serta konsistensi regulasi antara pusat dan (Heriningsih, 2013).

Di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah serius. Data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi di provinsi ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tercatat 73 kasus yang ditangani, naik 21,63% dari 60 kasus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) versi Transparency International yang dirilis CNBC Indonesia, skor IPK Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 37 dan menempatkan Indonesia pada peringkat enam di ASEAN sebuah indikasi bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan secara optimal.

Hasil penelitian mengenai hubungan antara temuan audit dan tingkat korupsi masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa studi menemukan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap korupsi (Panji & Utomo, 2023 ; Ruselvi et al., 2020), sementara studi lain tidak menemukan hubungan signifikan (Verawaty, 2019). Hal serupa juga terjadi dalam pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi daerah, yang menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada pendekatan metodologis, karakteristik daerah, serta periode pengamatan.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2023. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada meningkatnya jumlah kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir serta ketersediaan data keuangan dan audit yang memadai. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur dengan menyajikan bukti empiris terkini dan menjawab inkonsistensi hasil studi sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik atau pemberi mandat) dan agen (penerima mandat) dalam pengelolaan sumber daya atau pengambilan keputusan (Jensen & Mackling, 1976). Dalam konteks sektor publik, masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan kewenangan kepada pejabat publik sebagai agen. Permasalahan agensi muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara keduanya, yang diperparah oleh adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi lebih dibanding principa 1 (Perdana et al., 2023). Kondisi ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk praktik korupsi (Heriningsih, 2013).

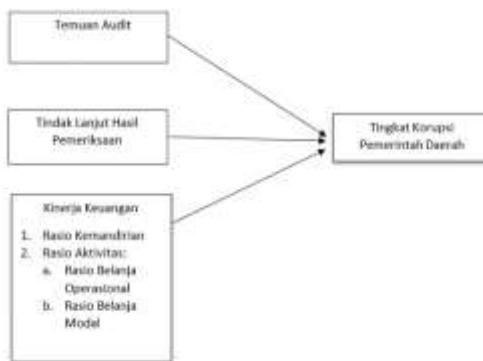
Teori Sinyal (*Signal Theory*)

Teori sinyal menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi (dalam hal ini pemerintah) berupaya mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal kepada publik, seperti melalui laporan keuangan yang andal, transparansi kinerja, dan penguatan sistem pengendalian internal (Evans III & Patton 1987 ; Annisa 2015). Dalam konteks sektor publik, audit independen dan pelaporan keuangan digunakan sebagai sinyal untuk menunjukkan akuntabilitas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat (Damiati 2016 ; Kiswanto et al., 2019)

Kerangka Pemikiran

Ilustrasi berikut mempresentasikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam studi ini mengenai pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

GAMBAR 1 KERANGKA PEMIKIRAN



Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Audit BPK RI mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada kerugian daerah, potensi kerugian, dan inefisiensi pengelolaan keuangan (Suhardjanto *et al.*, 2018 ; Aznedra *et al.*, 2020). Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) mendorong pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai representasi kinerja institusional yang sesuai norma hukum (Jensen & Meckling, 1976; Kiswanto *et al.*, 2019). Temuan audit dinilai sebagai sinyal atas potensi penyimpangan, dan beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah temuan dan tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012; Pramesti & Haryanto, 2019 ; Jehandu *et al.*, 2020), meskipun terdapat pula hasil yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan (Al-Faruqi *et al.*, 2024). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Korupsi

Tindak lanjut hasil audit memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas audit, karena langkah korektif lebih berdampak dibanding sekadar identifikasi temuan (Liu

& Lin, 2012). Berdasarkan teori keagenan, tindak lanjut yang baik dapat menekan perilaku oportunistik agen dalam mengelola sumber daya publik (Kiswanto et al., 2019). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi audit berkontribusi negatif terhadap tingkat korupsi, artinya semakin tinggi tingkat tindak lanjut, maka potensi korupsi cenderung menurun (Verawaty, 2019; Masyitoh et al., 2015 ; Ruselvi et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2: Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan atas Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Korupsi

Penyampaian laporan keuangan memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan turut mengawasi jalannya pemerintahan (Perdana et al., 2023). Dalam konteks teori sinyal, hal ini merupakan bentuk pengurangan asimetri informasi antara pemerintah dan publik (Spence, 2002; Kiswanto et al., 2019). Rasio kemandirian daerah mencerminkan tingkat kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah, terutama melalui pajak dan retribusi. Rasio yang tinggi menunjukkan kesejahteraan dan partisipasi publik yang meningkat (Wahyuni & Malang, 2004; Heriningsih, 2013), yang dapat menekan praktik korupsi (Kiswanto et al., 2019). Namun, Pratama & Faisal (2016) menemukan pengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: Rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan atas Rasio Aktivitas terhadap Tingkat Korupsi

Rasio aktivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk pengeluaran rutin dan pembangunan secara optimal (Annisa, 2015). Dalam kerangka teori sinyal, informasi ini disampaikan melalui LKPD yang telah diaudit untuk menunjukkan kinerja yang baik, di mana rasio aktivitas yang tinggi dapat mengindikasikan rendahnya potensi korupsi (Kiswanto et al., 2019). Namun, hubungan ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Heriningsih (2013) menemukan hubungan positif antara aktivitas dan indeks korupsi, sementara Kiswanto et al. (2019) menyatakan tidak ada pengaruh, dan Nugroho (2016) menemukan pengaruh negatif. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Rasio aktivitas atas Rasio Belanja Operasional berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

H5: Rasio aktivitas atas Rasio Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.



METODE PENELITIAN

Temuan Audit

BPK RI mengklasifikasikan temuan audit ke dalam dua kategori utama, yaitu kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Heriningsih, 2013). Penelitian ini memfokuskan evaluasi pada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai indikator utama, dengan mengukur total temuan yang disesuaikan dengan jumlah populasi pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian (Liu & Lin, 2012).

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit

Tindak lanjut hasil audit memungkinkan pemerintah bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengelolaan keuangan publik (Ruselvi et al., 2020). Tanpa penyelesaian yang memadai, hasil audit tidak akan efektif dalam menciptakan akuntabilitas. Oleh karena itu, tingkat keaktifan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi indikator penting akuntabilitas publik (Verawaty, 2019). Dalam penelitian ini mengambil data BPK pada jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan audit dibagi jumlah rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai hasil dari suatu kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran, dengan fokus pada kualitas dan kuantitas (Ronald et al., 2010). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah variabel independen yang bisa diukur menggunakan dua kondisi keuangan APBD yang meliputi tingkat independensi, tingkat aktivitas, dan tingkat pertumbuhan, dengan tiga situasi menjadi rasio ukuran kinerja negara. Pada penelitian ini mengambil data LHP BPK pada laporan realisasi anggaran.

Rasio Kemandirian

Menurut Wahyuni & Malang (2004) hubungan antara independent menunjukkan kapasitas pemerintah dalam membiayai kegiatan nasional, perkembangan, dan layanan mereka sendiri untuk mereka yang telah menyelesaikan kewajiban pajak dan pajak sebagai sumber keuangan yang dibutuhkan wilayah tersebut. Tingkat kemandirian daerah tercermin dari proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, yang mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer Daerah}}$$

Rasio Aktivitas

Rasio ini mencerminkan tingkat fokus pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya secara efisien antara belanja operasional dan belanja untuk kegiatan pembangunan, semakin besar proporsi anggaran diarahkan pada belanja rutin, maka semakin kecil pula porsi belanja pembangunan yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas ekonom bagi masyarakat (Wahyuni & Malang, 2004).

A. Rasio Belanja Operasional



$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total belanja rutin terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

B. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total belanja pembangunan terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui pemodelan regresi linier berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Korupsi

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

x_1 = Temuan Audit

x_2 = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

x_3 = Kinerja Keuangan atas rasio kemandirian

x_4 = Kinerja Keuangan atas rasio aktivitas (ratio belanja operasional)

x_5 = Kinerja Keuangan atas rasio aktivitas (ratio belanja modal)

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 1

Pemilihan Sampel Penelitian

Proses Pengambilan Sampel	Jumlah Pemda 2020-2023
Jumlah Pemerintah Kab dan Kota di Jawa Tengah	36
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak tersedia	(1)
Jumlah Pemda Sampel	35
Jumlah Pengamatan (tahun)	4
Jumlah Sampel Akhir	140



Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	140	0	10	2.97	1.709
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	140	.02618	1.00000	.5202293	.15850182
Rasio Kemandirian	140	.03247	1.12608	.2722735	.15819945
Rasio Belanja Operasional	140	.58440	.93505	.7932454	.07147545
Rasio Belanja Modal	140	.06924	.26597	.1444437	.03699592
Tingkat Korupsi	140	0	6	1.34	1.036
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder tahun 2025

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 140 sampel data, diperoleh gambaran umum mengenai. Rata-rata jumlah temuan audit oleh BPK adalah 2,97 dengan nilai terendah 0 serta tertinggi 10, menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap perundangan-perundangan. Rata-rata tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) sebesar 0,5202 mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah hanya menindaklanjuti sekitar setengah dari seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Nilai minimum pada variabel kinerja keuangan atas rasio kemandirian daerah adalah 0,03247 sedangkan nilai maksimum mencapai 1,12608 dengan rata-rata sebesar 0,2723. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusatnya. Nilai minimum pada variabel kinerja keuangan atas rasio aktivitas (ratio belanja operasional) adalah 0,5844 sedangkan nilai maksimum mencapai 0,9350 dengan rata-rata sebesar 0,7932. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk kebutuhan operasional.

Nilai minimum pada variabel kinerja keuangan atas rasio aktivitas (ratio belanja modal) adalah 0,0692 sedangkan nilai maksimum mencapai 0,2659 dengan rata-rata sebesar 0,1444. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah daerah hanya mengalokasikan sekitar 14% dari total anggarannya untuk belanja modal. Pada variabel tingkat korupsi Nilai minimum sebesar 0 menunjukkan bahwa ada daerah yang tidak memiliki kasus korupsi sama sekali, sedangkan nilai maksimum mencapai 6 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merupakan persoalan yang cukup signifikan di lingkungan pemerintahan daerah, meskipun dengan intensitas yang bervariasi antar daerah.

**Tabel 3****Hasil Uji Asumsi Klasik**

No.	Uji	Hasil Uji		
1.	Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed) :0,095		
2.	Uji Multikolinearitas	Tolerance VIF Temuan Audit 0,921 1,085 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,227 4,412 Kinerja Keuangan atas 0,230 4,341 Rasio Kemandirian		
3.	Uji Heteroskodesitas	Sig Temuan Audit 0,740 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,783 Rasio Kemandirian 0,414 Rasio Belanja Operasional 0,037 Rasio Belanja Modal 0,045		
4.	Uji Autokorelasi	Asymp. Sig. (2-tailed) :0,127		

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi seluruh prasyarat statistic. Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov- Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,95 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model. Terakhir, hasil uji Runs Test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,127 ($> 0,05$), yang berarti residual tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan memenuhi asumsi klasik yang diperlukan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian Hipotesis				
No.	Uji	Hasil Uji		
1.	Uji F	Hasil : 901,899 Sig : <0,001b		
2.	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R)	Adjusted R : 0,970		
3.	Uji T	B T Sig Temuan Audit -0,038 -7,258 <0,001 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,444 7,824 <0,001 Rasio Kemandirian -0,580 -10,023 <0,001		



		Rasio Belanja Operasional	-.009	-0,087	0,931
		Rasio Belanja Modal	-1.053	-8.030	<.001

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, artinya semakin banyak temuan, tingkat korupsi cenderung menurun. Temuan ini sejalan dengan Al-Faruqi et al. (2024) serta yang menegaskan bahwa publikasi hasil audit meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi korupsi. Olken (2007) juga menunjukkan bahwa audit eksternal mampu menurunkan penyalahgunaan anggaran, bahkan dalam sistem pengawasan yang lemah. Namun, hasil ini bertentangan dengan teori keagenan dan temuan Liu & Lin (2012), Pramesti & Haryanto (2019), serta Jehandu et al., (2020) yang menyatakan bahwa banyaknya temuan justru mencerminkan potensi korupsi yang tinggi akibat pelanggaran regulasi.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat korupsi, mengindikasikan bahwa peningkatan tindak lanjut tidak selalu menurunkan praktik korupsi. Temuan ini sejalan dengan Isnadiva & Haryanto (2021) serta Bawono & Putra (2022), yang menyatakan bahwa tindak lanjut bersifat formal tidak cukup efektif tanpa dukungan penegakan hukum, partisipasi publik, dan independensi verifikasi. Rachman et al. (2020) juga menyoroti bahwa tingginya skor tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak selalu mencerminkan perubahan perilaku aparatur. Hasil ini tidak mendukung teori keagenan dan bertentangan dengan temuan Verawaty (2019), Liu & Lin (2012), serta Ruselvi et al. (2020) yang menyatakan bahwa TLHP berdampak negatif terhadap korupsi karena meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan atas Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, menunjukkan bahwa daerah yang mampu membiayai kebutuhannya sendiri cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Temuan ini mendukung Heriningsih (2013) yang menyatakan bahwa tingginya rasio kemandirian mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta tata kelola keuangan yang lebih baik. Hasil ini juga sesuai dengan teori sinyal (Evans III & Paton, 1987), di mana transparansi fiskal meningkat seiring dengan kontribusi publik terhadap pendapatan daerah (Siregar, 2017). Namun, hasil ini tidak sejalan dengan Pratama et al. (2016) dan Kiswanto et al. (2019), yang menemukan bahwa rasio kemandirian justru berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, karena peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat memperumit alokasi anggaran dan memperbesar peluang penyimpangan.



Pengaruh Kinerja Keuangan atas Rasio Aktivitas (Rasio Belanja Operasional) terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio belanja operasional tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja rutin tidak secara langsung mencerminkan tingkat integritas atau efektivitas pencegahan korupsi. Hasil ini sejalan dengan Heriningsih (2013), yang menyatakan bahwa baik tingginya proporsi belanja operasional maupun rasio aktivitas tidak dapat dijadikan indikator bebasnya laporan keuangan dari praktik korupsi. Temuan ini tidak sejalan dengan Wicaksono et al. (2022) dan Kiswanto et al. (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif belanja modal terhadap korupsi, terutama karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.

Pengaruh Kinerja Keuangan atas Rasio Aktivitas (Rasio Belanja Modal) terhadap Tingkat Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, mendukung temuan Agung (2016) yang menemukan hubungan serupa pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penemuan ini juga selaras dengan teori sinyal, di mana pemerintah daerah menyampaikan kinerja melalui LKPD (Kiswanto et al., 2019).. Temuan ini tidak sejalan dengan Heriningsih (2013), yang menyatakan rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap korupsi, serta bertentangan dengan (Wicaksono et al., 2022) yang menyatakan bahwa belanja modal justru berpotensi meningkatkan korupsi karena rawan penyimpangan dalam proses pengadaan yang melibatkan banyak pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio aktivitas yaitu rasio belanja operasional serta rasio belanja modal terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Sampel penelitian ini 140 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2023.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kinerja keuangan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja operasional, dan rasio belanja modal terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan pengaruh positif. Serta kinerja keuangan atas rasio kemandirian memiliki pengaruh negatif pada tingkat korupsi, kinerja keuangan atas rasio aktivitas (rasio belanja operasional) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, kinerja keuangan atas rasio aktivitas (rasio belanja modal) mempengaruhi secara negatif pada tingkat korupsi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya keterbatasan data laporan hasil pemeriksaan di beberapa daerah. Selain itu, kajian yang mengaitkan kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi masih terbatas secara empiri serta pendekatan yang digunakan masih bersifat kuantitatif dan belum menggali aspek kualitatif yang dapat memperkaya konsteksual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan, menambahkan variabel relevan seperti transparansi dan sistem pengendalian internal, serta dapat menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.



REFERENSI

- Agung, N. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Temuan Sistem Pengendalian Intern Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. 30(8), 2221.
- Al-Faruqi, M. I., Pupung Purnamasari, & Mey Maemunah. (2024). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy, 4(1), 728–737. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12454>
- Annisa, S. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. 151, 10–17.
- Aznedra, Nurhayaty, & Putra, R. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Kepulauan Riau). *Equilibiria*, 7(1), 33–39.
- Cinintya, C. (2022). Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. 2721–2735.
- Damiati, L. (2016). *HASIL AUDIT PEMERINTAHAN DAN TINGKAT KORUPSI* (Vol. 4, Issue June).
- Ertimi, B. E., & Saeh, M. A. (2013). The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy. *International Journal of Economics and Finance*, 5(8), 1–8. doi: 10.5539/ijef.v5n8p1
- Evans III, J. H. ., & Patton, J. M. . (1987). *Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting Author (s): John H. Evans III and James M. Patton Source : Journal of Accounting Research , Vol . 25 , Studies on Stewardship Uses of Published by : Wiley on behalf of Accounting Research Center , B. 25(May)*, 130–158.
- Heriningsih, S. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Jehandu, V., Salle, A., & Allo Layuk, P. K. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Pemerintah Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(3), 114–131. doi: 10.52062/keuda.v4i3.1097
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. doi: 10.1017/CBO9780511817410.023
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259. doi: 10.35808/ijeba/323
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control : Evidence from China ' s provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. doi: 10.1016/j.cjar.2012.01.002
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, September 2015*, 1–26.



- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. Retrieved from <http://ejournals.s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Perdana, A. I., Prasetyo, T. J., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2023). *APAKAH OPINI AUDIT, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN APBD*. 1(2), 74–89.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. doi: 10.17977/um004v6i22019p298
- Pratama, R. A., & Faisal. (2016). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(9), 1–14.
- Ronald, A., Ekonomi, F., & Janabadra, U. (2010). Di Kabupaten Kulon Progo. I(1), 31–42.
- Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Suhardjanto, D., Syafruddin, M., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 3. Retrieved from www.news.okezone.com
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Mbia*, 18(2), 79–99. doi: 10.33557/mbia.v18i2.428
- Wahyuni, N., & Malang, J. A. F. E. U. M. (2004). *ANALISIS RASIO UNTUK MENGIKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG* Nanik. 1–18.
- Wicaksono, G. S., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle*. 6, 1016–1028.
- Yahya, A. S., Cahyono, A. S., & Sipayung, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1181–1190. doi: 10.58812/jhhws.v2i12.872